

***Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari dalam Perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah***

**Rian Hidayat, Iskandar Syukur, Muhammad jayus**  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia  
Email: [masiyan752@gmail.com](mailto:masiyan752@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to analyze the implementation of the Regent Regulation of Pesawaran Regency concerning the management of marine tourism areas from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. Marine tourism has significant potential in supporting regional economic development, increasing community welfare, and preserving coastal environmental sustainability. However, the management of marine tourism requires effective government policies and active participation from stakeholders to ensure the realization of public benefit (maṣlahah ‘āmmah). This research employed a qualitative approach with a case study design conducted in Pesawaran Regency, Lampung Province. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the implementation of marine tourism management policies in Pesawaran Regency has been carried out through planning, organizing, and implementation stages involving the local government, local communities, and business partners. The development of marine tourism contributes to improving the local economy and optimizing regional tourism potential. From the perspective of siyāsah tanfīdziyyah, the role of the local government reflects the implementation of executive authority in managing public interests, environmental sustainability, and social welfare in accordance with the principles of justice and public benefit in Islamic governance.*

***Keywords:*** *Marine Tourism Management, Regional Policy, Siyāsah Tanfīdziyyah*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tentang pengelolaan kawasan wisata bahari dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. Wisata bahari memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Namun, pengelolaan wisata bahari memerlukan kebijakan pemerintah yang efektif serta keterlibatan berbagai pihak guna mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlahah ‘āmmah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta mitra usaha. Pengembangan wisata bahari memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan optimalisasi potensi wisata daerah. Dalam perspektif siyāsah tanfīdziyyah, peran pemerintah daerah mencerminkan pelaksanaan otoritas eksekutif dalam mengelola kepentingan publik, menjaga kelestarian lingkungan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pemerintahan Islam.

***Kata Kunci:*** *Pengelolaan Wisata Bahari, Kebijakan Daerah, Siyāsah Tanfīdziyyah*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas ribuan pulau besar maupun kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk pada sektor kelautan dan pariwisata, yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki prospek dalam pembangunan daerah adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga berkaitan dengan pelestarian lingkungan, penguatan budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pengembangan kepariwisataan memerlukan perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan melalui berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan keberlanjutan (*sustainable tourism*). Pendekatan keberlanjutan menjadi penting karena selaras dengan orientasi pembangunan nasional yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pariwisata bahari merupakan bagian dari sektor pariwisata yang mencakup berbagai aktivitas dan layanan berbasis kelautan, seperti pelayaran, wisata bawah laut, jasa pantai, hingga konservasi kawasan pesisir. Pengembangan wisata bahari tidak hanya bergantung pada potensi alam, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah, regulasi, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi kawasan wisata. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari, baik dalam bentuk wisata edukasi, konservasi, maupun wisata bawah laut (*underwater tourism*). Potensi tersebut didukung oleh luas kawasan konservasi perairan, panjang garis pantai, serta kekayaan biodiversitas laut yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya kelautan terbesar di dunia.<sup>2</sup>

Wisata bahari merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan potensi kawasan perairan dan kelautan sebagai daya tarik utama, baik berupa wisata pesisir, wisata bawah laut, maupun aktivitas rekreasi yang berkaitan dengan ekosistem bahari. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan keindahan alam laut, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, kepuasan wisatawan, serta

---

<sup>1</sup> Sujali, "Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat Pada Kawasan Ubud Bali, Vol.2 No.22 (2017)

<sup>2</sup> Gagih Pradini, *Pariwisata Bahari*, by Penerbit Widina Media Utama, Jawa Barat, 2024

keterpaduan pengelolaan kawasan wisata.<sup>3</sup> Sehingga, pengembangan wisata bahari memerlukan tata kelola yang terintegrasi melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pengembangan wisata bahari melalui kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, kearifan lokal, serta konservasi ekosistem laut. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya dipahami sebagai aktivitas perjalanan dan rekreasi semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2017 pasal 2 mengenai wisata bahari bahwa Maksud pengelolaan kawasan wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 3 juga di jelaskan mengenai tujuan pengelolaan wisata yaitu menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional, menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah kawasan wisata, menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata, menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata.<sup>4</sup>

Pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang kompleks karena melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan, cinderamata, usaha-usaha makanan khas, penginapan dan transportasi yang juga merupakan salah satu faktor penyebab peningkatan pendapatan di daerah tersebut. Selain hal-hal diatas, pengembangan sektor pariwisata melalui kegiatan promosi harus beragam, perlu diperhatikannya keunikan masing-masing di setiap tujuan wisata menyadarkan masyarakat untuk menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata, dan merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata sebagai upaya meningkatkan pembangunan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), serta kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkenalkan budaya lokal, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.<sup>5</sup> Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung memiliki potensi wisata bahari yang cukup besar

---

<sup>3</sup> Atikah Nurhayati, *Io-Ekoregion Kawasan Wisata Bahari Berbasis Konservasi*, Cv Bravo Press Indonesia, 2024

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

<sup>5</sup> Pendit, *Ilmu Kepariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2006),

dengan beragam daya tarik alam pesisir dan laut. Tingginya kunjungan wisatawan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, khususnya sebagai sumber mata pencaharian. Namun demikian, aktivitas wisata juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti rendahnya kesadaran pengunjung terhadap kebersihan lingkungan dan munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma sosial masyarakat setempat, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah daerah maupun pengelola wisata.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan pariwisata dapat dianalisis melalui pendekatan *Siyāṣah Tanfīdziyyah* sebagai bagian dari fiqh siyasah yang menitikberatkan pada pelaksanaan otoritas pemerintahan dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*).<sup>6</sup> Islam memandang aktivitas pariwisata tidak hanya sebagai sarana rekreasi dan ekonomi, tetapi juga sebagai media pembelajaran, refleksi spiritual, serta pengenalan terhadap kebesaran ciptaan Allah SWT. Namun demikian, perkembangan sektor pariwisata, khususnya wisata bahari, juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan moral yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, rendahnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas wisata.<sup>7</sup>

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran dalam perspektif *siyāṣah tanfīdziyyah*, khususnya terkait peran pemerintah daerah dalam mengelola kepentingan publik, menjaga ketertiban sosial, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian pengelolaan wisata bahari dengan perspektif fiqh siyasah, khususnya *siyāṣah tanfīdziyyah*, yang selama ini masih jarang digunakan dalam analisis kebijakan pariwisata daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam dan tata kelola pariwisata berbasis nilai-nilai kemaslahatan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap konteks alamiah serta interaksi dengan subjek penelitian. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara spesifik praktik penutupan jalan dalam konteks sosial dan hukum di tingkat lokal, sehingga dapat diperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan.<sup>8</sup> Lokasi penelitian

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, "Konsep Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Fiqh Politik Islam," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2015), hlm. 253–265.

<sup>7</sup> Santoso, Fajar. 2007. *Pariwisata Dalam Pandangan Islam*. Padang: Majalah Online,

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9–11.

ditetapkan di wisata Bahari kabupaten lampung Selatan Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu objek wisata di kabupaten pesawaran

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan terhadap aktivitas penutupan jalan, wawancara mendalam dengan aparaturnya kelurahan dan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan yang relevan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur *fiqh siyasah*, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalan.<sup>9</sup>

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan dan berulang untuk mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan antara temuan lapangan dengan kerangka teori *siyāsah tanfidziyyah* dan regulasi lalu lintas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan penutupan jalan dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat.<sup>10</sup> Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas temuan serta memastikan konsistensi interpretasi data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai praktik penutupan jalan serta implikasinya terhadap kepentingan publik di tingkat desa.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Pesawaran dalam Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*

Salah satu potensi utama yang menjadi daya tarik wisata bahari di Kabupaten Pesawaran adalah keberadaan terumbu karang dan keanekaragaman sumber daya hayati laut yang memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomis. Keragaman spesies terumbu karang, ikan hias, serta panorama bawah laut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, khususnya wisatawan yang melakukan aktivitas *snorkeling* dan *diving*.<sup>11</sup> Potensi tersebut menjadikan wisata bahari sebagai sektor strategis yang mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dituntut untuk mengelola sektor wisata bahari secara optimal dan berkelanjutan, mengingat sektor ini telah ditetapkan sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan daerah.<sup>13</sup> Pengelolaan

---

<sup>9</sup> Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Azka Pustaka, 2023)

<sup>10</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Los Angeles: Sage Publications, 2014), hlm. 31–33.

<sup>11</sup> M. Rizki Pratama dan Siti Aisyah, *Potensi Ekosistem Terumbu Karang untuk Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran* (Bandar Lampung: LP2M Universitas Lampung, 2021), 45.

<sup>12</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, *Strategi Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta: Kemenparekraf, 2022), 78–80.

<sup>13</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, *Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesawaran Tahun 2020–2025* (Pesawaran: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2020), 112.

pariwisata tidak hanya berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata, tetapi juga mencakup berbagai komponen pendukung seperti atraksi wisata, amenitas, aksesibilitas, pelayanan wisata, promosi, hingga penyediaan sumber daya manusia yang profesional.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa suatu destinasi wisata memiliki daya saing yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan wisata yang terencana dan sesuai dengan prosedur yang berlaku guna menciptakan kepuasan wisatawan, sehingga dapat mendorong peningkatan kunjungan ulang (*revisit intention*) serta memperluas promosi wisata melalui pengalaman wisatawan kepada masyarakat luas.<sup>15</sup>

Beberapa unsur penting dalam upaya peningkatan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Ketiga aspek tersebut merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan pariwisata yang terintegrasi guna mewujudkan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan dan berdaya saing.<sup>16</sup>

*Pertama*, aspek perencanaan menjadi tahapan fundamental dalam menentukan arah pengembangan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran. Perencanaan dilakukan melalui penetapan tujuan, penyusunan strategi, serta penentuan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengembangan destinasi wisata. Dalam konteks ini, diperlukan perencanaan yang matang terkait pola kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, pengembangan jenis dan paket wisata, penentuan tarif atau tiket wisata, penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan aksesibilitas dan transportasi, serta optimalisasi peran masyarakat lokal dalam mendukung aktivitas pariwisata. Perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan wisata bahari sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata.<sup>17</sup>

*Kedua*, aspek pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas, koordinasi, dan pengaturan tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata bahari. Pengorganisasian yang efektif diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat, maupun mitra usaha, dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya secara optimal. Selain itu, pengorganisasian juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sarana dan

---

<sup>14</sup> I Nyoman Sudiarta, *Manajemen Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasi* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2019), 203.

<sup>15</sup> Philip Kotler, John T. Bowen, dan James C. Makens, *Marketing for Hospitality and Tourism*, 6th ed. (Boston: Pearson, 2017), 159.

<sup>16</sup> Sunaryo, *Manajemen Pariwisata: Solusi untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020), 267.

<sup>17</sup> Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 15 Maret 2024 di Kantor Dinas Pariwisata Pesawaran.

prasarana pariwisata, serta menciptakan sistem pengelolaan wisata yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dengan adanya struktur pengelolaan yang jelas, pengembangan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan daya saing destinasi wisata di masa mendatang.

*Ketiga*, aspek pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari seluruh program dan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan pengembangan wisata bahari membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata memiliki peran strategis dalam melakukan promosi, pengawasan, dan pengembangan kebijakan pariwisata, sedangkan masyarakat berperan dalam mendukung pengelolaan wisata melalui penyediaan jasa dan fasilitas pendukung, seperti penyewaan perahu, perlengkapan wisata bahari, gazebo, dan layanan wisata lainnya. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan wisata bahari yang optimal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat sebagai pengelola wisata memandang bahwa aktivitas wisata dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan spiritual. Dalam tradisi Islam, perjalanan dipandang sebagai sarana pembelajaran, pencarian ilmu pengetahuan, serta refleksi terhadap kebesaran ciptaan Allah SWT. Konsep perjalanan dalam Islam tercermin dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, yang tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga mengandung nilai sosial, pendidikan, dan penguatan ukhuwah. Oleh karena itu, pengembangan wisata bahari perlu diarahkan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral, pelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan dalam masyarakat.

Dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*, aktivitas pariwisata pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan tradisi perjalanan dalam Islam yang berkembang sejak awal penyebaran Islam sebagai agama yang universal. Konsep *ziyarah* yang secara harfiah berarti berkunjung menjadi salah satu dasar lahirnya aktivitas perjalanan dalam tradisi Islam, baik untuk tujuan spiritual, sosial, pendidikan, maupun silaturahmi. Dari konsep tersebut kemudian berkembang berbagai pranata sosial yang diatur melalui nilai-nilai etika dan hukum Islam, sehingga aktivitas perjalanan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan sosial, memperkuat ukhuwah, serta memperluas pengetahuan masyarakat.

Perkembangan konsep *ziyarah* juga melahirkan konsep *dhiyāfah*, yaitu tata krama menerima dan menghormati tamu yang mengatur hubungan sosial antara tamu (*ḍaif*) dan tuan rumah (*muḍīf*). Dalam konteks pengelolaan wisata bahari, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan wisata yang menjunjung tinggi etika, keramahan, keamanan, kenyamanan, dan penghormatan terhadap norma sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan tata kelola wisata yang berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan, moralitas, dan tanggung jawab sosial.

Dalam kerangka *siyāsah tanfidziyyah*, pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas eksekutif memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pariwisata agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan kepentingan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Pemerintah tidak hanya berperan dalam pengembangan infrastruktur dan promosi wisata, tetapi juga dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi nilai-nilai moral masyarakat, serta memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak lingkungan maupun bertentangan dengan norma agama dan budaya lokal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Pesawaran dalam Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah***

Pengembangan sektor pariwisata pada dasarnya diarahkan sebagai salah satu instrumen pembangunan daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>18</sup> Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, sektor pariwisata juga memiliki efek multiplikatif (*multiplier effect*) terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti industri kerajinan, kuliner, transportasi, perdagangan, dan jasa pelayanan wisata.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pengembangan pariwisata memerlukan kesiapan pemerintah daerah serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat agar pengelolaan destinasi wisata dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Supriyono, *Pembangunan Ekonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 134.

<sup>19</sup> I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata: Dampak Sosial dan Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 89–91.

<sup>20</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, *Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan* (Jakarta: Kemenparekraf, 2021), 56.

Dalam konteks Kabupaten Pesawaran, pengembangan wisata bahari menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, terdapat beberapa faktor pendukung utama dalam pengembangan wisata bahari di daerah tersebut. *Pertama*, banyaknya objek wisata bahari yang tersebar di wilayah Kabupaten Pesawaran menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Berbagai destinasi wisata pantai, seperti Pantai Mutun, Pantai Klara, Pantai Ringgung, dan Queen Artha, telah dikenal sebagai kawasan wisata yang memiliki panorama alam pesisir yang menarik dan menjadi tujuan rekreasi masyarakat.

*Kedua*, keindahan alam wisata bahari Kabupaten Pesawaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Kabupaten Pesawaran memiliki puluhan pulau yang tersebar di kawasan pesisir dengan karakteristik alam yang beragam dan eksotis. Salah satu destinasi unggulan adalah Pulau Pahawang yang dikenal luas karena keindahan pantai, kejernihan air laut, serta panorama bawah lautnya yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Keindahan alam tersebut memberikan potensi besar bagi pengembangan wisata berbasis konservasi dan ekowisata bahari yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.<sup>21</sup>

*Ketiga*, keanekaragaman hayati laut yang dimiliki Kabupaten Pesawaran turut menjadi faktor pendukung pengembangan wisata bahari. Kawasan pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Pesawaran memiliki kekayaan biota laut, terumbu karang, serta berbagai jenis fauna laut yang menjadi daya tarik wisata bawah laut (*marine tourism*). Keberagaman sumber daya hayati tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi melalui sektor pariwisata, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Oleh karena itu, pengelolaan wisata bahari perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi alam yang dimiliki tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan generasi mendatang.

Dalam perspektif *siyāṣah tanfīdziyyah*, pengembangan wisata bahari merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*maṣlahah ‘āmmah*). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa pengelolaan wisata bahari tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, ketertiban sosial, dan kesejahteraan

---

<sup>21</sup> Ahmad Junaidi dan Lestari Dewi, *Ekowisata Bahari: Prinsip dan Aplikasi di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2022), 112–114.

masyarakat lokal. Dengan demikian, pengembangan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk implementasi tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya kelautan dan pesisir. Implementasi pengelolaan wisata bahari dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta mitra usaha. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan destinasi wisata bahari yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kabupaten Pesawaran memiliki berbagai faktor pendukung dalam pengembangan wisata bahari, antara lain banyaknya objek wisata pantai dan pulau, keindahan panorama alam laut, serta kekayaan keanekaragaman hayati bawah laut yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Potensi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan sektor ekonomi pendukung lainnya. Namun demikian, pengembangan wisata bahari juga memerlukan pengawasan dan pengelolaan yang optimal agar tetap menjaga kelestarian lingkungan, ketertiban sosial, dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Dalam perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*, pengelolaan wisata bahari mencerminkan pelaksanaan fungsi otoritas pemerintah daerah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator dalam pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan etika masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Dengan demikian, pengembangan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran perlu diarahkan pada tata kelola pariwisata yang profesional, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai kemaslahatan agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan harmonisasi sosial masyarakat.

#### **Referensi**

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Bagyono. *Pariwisata dan Perhotelan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Isdarmanti. *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan StiPrAm Yogyakarta, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad. "Konsep Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Fiqh Politik Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 253–265.
- Junaidi, Ahmad, dan Lestari Dewi. *Ekowisata Bahari: Prinsip dan Aplikasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Kemenparekraf, 2021.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. *Strategi Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Kemenparekraf, 2022.
- Kotler, Philip, John T. Bowen, dan James C. Makens. *Marketing for Hospitality and Tourism*. 6th ed. Boston: Pearson, 2017.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: Sage Publications, 2014.
- Nurhayati, Atikah. *Io-Ekoregion Kawasan Wisata Bahari Berbasis Konservasi*. Sleman: CV Bravo Press Indonesia, 2024.
- Pendit, Nyoman S. *Ilmu Kepariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Pendit. *Ilmu Kepariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran.
- Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran. Pasal 2.
- Pitana, I Gede, dan Putu G. Gayatri. *Sosiologi Pariwisata: Dampak Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Pradini, Gagih. *Pariwisata Bahari*. Jawa Barat: Penerbit Widina Media Utama, 2024.
- Pratama, M. Rizki, dan Siti Aisyah. *Potensi Ekosistem Terumbu Karang untuk Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran*. Bandar Lampung: LP2M Universitas Lampung, 2021.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. *Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesawaran Tahun 2020–2025*. Pesawaran: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2020.
- Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Azka Pustaka, 2023.
- Santoso, Fajar. *Pariwisata dalam Pandangan Islam*. Padang: Majalah Online, 2007.
- Sudiarta, I Nyoman. *Manajemen Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasi*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sujali. "Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat pada Kawasan Ubud Bali." Vol. 2, No. 22 (2017).
- Sunaryo. *Manajemen Pariwisata: Solusi untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020.
- Supriyono, Bambang. *Pembangunan Ekonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.